LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III









TAHUN 2026

BALAI P3KP SUMATERA II
KEMEN PKP

pkp.go.id/balai/sumatera-ii

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim, segala puji bagi Allah atas Karunia dan Rahmatnya sehingga kegiatan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II pada Triwulan III Tahun 2026 telah terlaksana.

Laporan Kinerja Triwulan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Intansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini merupakan kewajiban dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II yang di laporkan sebagai bahan evaluasi.

Dengan dibuatnya Laporan Evaluasi setiap bulannya pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II kiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan, transparan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pencapaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II.

Kemudian dengan telah tersusunnya Laporan Evaluasi bulanan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya **Laporan Triwulan III Tahun 2026** ini, semoga bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memacu kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II dimasa yang akan datang. Namun kami menyadari dalam pembuatan dan/atau penyusunan Laporan Triwulan III ini mungkin ada beberapa kesalahan dan kekurangan yang akan kami perbaiki dengan komitmen penuh dari seluruh stakeholders dan komponen yang ada di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II.

Medan, 30 September 2026

Kepala Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sumatera II



Rizaldi Andi Atjo, S.T., M.T.
NIP. 198202192009031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang **1**
1.2 Tugas dan Fungsi. **2**
1.3 Struktur Organisasi **4**
BAB II CAPAIAN KINERJA 7
2.1. Target Kinerja Triwulan I/II/II/IV Berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja. **7**
2.2. Metode Pengukuran Kinerja **12**
2.3. Capaian target Triwulan - III **13**
2.4. Permasalahan dan Faktor Keberhasilan **21**
BAB III PENUTUP 23
3.1. Rencana Tindak Lanjut. **23**
Tabel 3.1. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut. **23**
Tabel 3.2. Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya **25**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II selaku perpanjangan tangan pusat di daerah, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Satuan Kerja sebagai sub sistem dari sistem Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berupaya memenuhi pembangunan khususnya pembangunan bidang perumahan di Provinsi Sumatera Utara.

Dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi organisasi, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang langsung dicapai pada lingkup provinsi dan nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sehubungan dengan hal tersebut Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Triwulan. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari percapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Tugas dan Fungsi.

Balai Pelaksana Penyediaan Peruamahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II merupakan perpanjangan tangan pusat di daerah yang mempunyai tugas membantu Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perdesaan, Direktorat Jenderal Perkotaan dan Sekretariat Jenderal, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Menyelenggarakan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II turut mendukung penyelenggaraan Sebagian fungsi yang diselenggarakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera II, yaitu :

a) penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
b) penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
c) pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
d) pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
e) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
f) pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
g) pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;
h) pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
i) pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
j) pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
k) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
l) pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
m) pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;

n) pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan

o) pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

1.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi UPT, dalam hal ini Balai, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu terdiri dari:

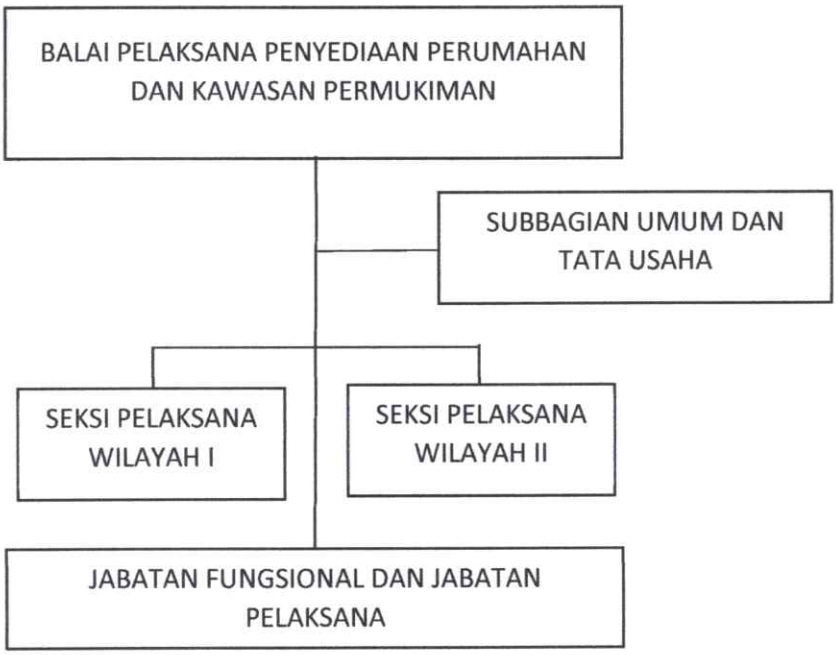
a. Subbagian Umum dan Tata Usaha;
b. Seksi Pelaksanaan Wilayah I;
c. Seksi Pelaksanaan Wilayah II; dan
d. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Tabel 1. Susunan Organisasi UPT

No.	Jabatan	Tugas
1	Subbagian Umum dan Tata Usaha	Melakukan penyusunan program dan anggaran, a. Melakukan pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia, b. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, c. Melakukan pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, d. Melakukan koordinasi administrasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen

		risiko, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.
2	Seksi Pelaksanaan Wilayah I	a. Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi dan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial; dan b. Melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data, pada wilayah pesisir sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.
3	Seksi Pelaksanaan Wilayah II	Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan

		Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.
4	Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana	Memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan



Gambar 1. Struktur Organisasi

BAB II
CAPAIAN KINERJA

2.1. Target Kinerja Triwulan I/II/II/IV Berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II atau yang disebut dengan BP3KP Sumatera II, dalam memetakan target kinerja, di dalamnya memuat target kinerja Balai beserta Satker PKP Provinsi Sumatera Utara yang berada di bawahnya. Target yang digunakan merupakan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Tahun 2026 BP3KP Sumatera II.

Penetapan target Tahun Anggaran 2026 meliputi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pogram Dukungan Manajemen mulai dari Triwulan IIhingga Triwulan IV. Terdapat beberapa kegiatan di dalam Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman, Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan, Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan, serta Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan jumlah target yaitu sejumlah 83 Dokumen/ Rekomendasi Kebijakan/ Unit/ Laporan/ Kegiatan dengan target pada Triwulan I, II, III, dan IV masing-masing sebesar 15%, 50%, 75%, dan 100%. Secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1.1.

Tabel 2.1.1 Penetapan Target Triwulan I/II/III/IV Program Perumahan dan Kawasan Permukiman BP3KP Sumatera II Tahun Anggran 2026

Kode	Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	TARGET AWAL					
				Jumlah Target	Aktivitas	TW-I (%)	TW-II (%)	TW-III (%)	TW-IV (%)
IA	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**		**Dokumen, Rekomendasi Kebijakan, Unit, Laporan, Kegiatan**			**15**	**50**	**75**	**100**
7659	**Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman**		**Dokumen, Rekomendasi Kebijakan, Unit**			**15**	**50**	**75**	**100**
	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni		**Dokumen, Rekomendasi Kebijakan**	**2**		**15**	**50**	**75**	**100**
	BMA.001	1) Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	Pengelolaan Data dan Informasi Program Satu Juta Rumah di Kawasan Pesisir di Balai Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	15	50	75	100
	PBF.001	2) Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	15	50	75	100
	Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan yang terlayani PSU		Dokumen, Unit						
	CBR.001	1) Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Lahan dan Fasilitas PSU	Dokumen	1	Verifikasi Usulan Pembangunan Rusun, Rusus dan PSU Kawasan Permukiman di Wilayah Pesisir serta Fasilitasi Serah Terima Aset	15	50	75	100
		2) Jumlah Pembangunan PSU	Unit	70		15	50	75	100
	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman		**Dokumen, Unit**	**1**		**15**	**50**	**75**	**100**
	CBR.002	1) Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	1. Pemenuhan Readiness Criteria Lokasi Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman serta Fasilitasi Serah Terima Aset	15	50	75	100
	RBB.008	2) Jumlah Unit Rumah Swadaya melalui Peningkatan Kualitas	Unit	2400	1. Pelaksanaan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman 2. Pengawasan dan Pengendalian	15	50	75	100

						Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman				
7660	**Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan**			**Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan, Kegiatan, Unit**			**15**	**50**	**75**	**100**
	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak huni diperdesaan			**Rekomendasi Kebijakan, Laporan, unit**			**15**	**50**	**75**	**100**
	ABF.007	1)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1	Penyusunan Perencanaan Teknis Perumahan Pedesaan	15	50	75	100
	FAE.004	2)	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Dokumen	1	Fasilitasi Pengalihan Aset Pembangunan Perumahan Perdesaan	15	50	75	100
		3)	Jumlah Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	Unit	540		15	50	75	100
	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas Pembangunan perumahan diperdesan			**Kegiatan**	**1**		**15**	**50**	**75**	**100**
	PEA.001	1)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Kegiatan	1	Penyusunan Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	15	50	75	100
		2)	Jumlah Stimulan Peningnkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	Unit	5100		15	50	75	100
	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam Pembangunan perumahan perdesaan			**Dokumen**	**2**		**15**	**50**	**75**	**100**
	CBR.001	1)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1	Penyusunan Perencanaan Kegiatan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	15	50	75	100
	CBR.002	2)	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesan	Dokumen	1	Pengelolaan Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	15	50	75	100
7660	**Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan**			**Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan, Kegiatan, Unit**			**15**	**50**	**75**	**100**
	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			Rekomendasi Kebijakan,Lapor N						
	ABF.001	1)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	Pelaksanaan Konsolidasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	15	50	75	100
	FAE 001	2)	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	laporan	2	1) Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan 2)	15	50	75	100

	Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan								
	ABF.002	1)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	Pelaksanaan Konsolidasi Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	15	50	75	100
	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan								
	ABF.003	1)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	Pelaksanaan Konsolidasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	15	50	75	100
	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan								
	ABF.004	1)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	Pelaksanaan Konsolidasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	15	50	75	100
	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan								
	ABF.005	1)	Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	Pelaksanaan Konsolidasi Penyiapan Bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	15	50	75	100
	RBB.008	2)	Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	Unit	2400	1) Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan 2) Pengawasan Pengendalian Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	15	50	75	100
7662	**Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman**			**Dokumen, Rekomendasi Kebijakan, Unit**			**15**	**50**	**75**	**100**
	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan public penyelenggaraan perumahan dan kwasan permukiman yang efektif dan akuntabel								
	ABF.004		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Rekomendasi Kebijakan	1	Penyusunan Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	15	50	75	100
	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian Risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman								
	ABF.005		Jumlah Rekomendasi kebijakan pengendalian Risiko dan pencegahan korupsi	Rekomendasi Kebijakan	1	Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko	15	50	75	100
	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evakuasi dalam penyelenggaraan tata Kelola dan pengendalian Risiko perumahan dan kawasan permukiman								
	FAE.001		Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata Kelola dan pengendalian risiko	Rekomendasi Kebijakan	1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	15	50	75	100
IA	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			**Dokumen, Rekomendasi Kebijakan, Unit, Laporan, Kegiatan**						
7665	**Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal**			**Layanan, Unit**			**15**	**50**	**75**	**100**
	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II			Layanan, Unit						
	EBA. 962	1)	Jumlah Layanan Umum	Layanan	2	Layanan Biro Umum	15	50	75	100
	EBA. 994	2)	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	15	50	75	100

	EBB. 951	3)	Jumlah Layanan Sarana Internal	Unit	2	1. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 2. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	15	50	75	100
7674	**Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman**			**Layanan**						
	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman			Layanan						
	EBA.962	1)	Jumlah Layanan Umum	Layanan	2	1. Layanan Umum Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman pada 19 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Layanan Umum Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman pada 35 Satker Provinsi	15	50	75	100
	EBA.963	2)	Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	Pengelolaan Data dan Informasi serta Publikasi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	15	50	75	100
	EBA.Z06	3)	Jumlah Layanan BMN	Layanan	1	Penatausahaan BMN Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman pada 19 Balai pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	15	50	75	100
7675	**Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan**									
	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman			Layanan						
	EBA.962	1)	Jumlah Layanan Umum	Layanan	2	Layanan Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	15	50	75	100
	EBA.963	2)	Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	Pengelolaan Data dan Informasi serta Publikasi Balai/Satker	15	50	75	100
7661	**Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan**									
	EBA.962		Jumlah Layanan Umum	Layanan	2	1. Layanan Umum Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan di Balai P3KP 2. Layanan Umum Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan di Satuan Kerja Penyediaan Perumahan	15	50	75	100
	EBA.963		Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	Pengelolaan Data dan Informasi serta Publikasi Perumahan Perkotaan di Balai P3KP	15	50	75	100
	EBA.Z06		Layanan BMN	Layanan	1	Rencana Kebutuhan dan Pengelolaan BMN Perumahan Perkotaan Balai P3KP	15	50	75	100

2.2. Metode Pengukuran Kinerja

Metode perhitungan yang digunakan yaitu realisasi jumlah masing-masing indikator kinerja kegiatan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II. Sedangkan Capaian merupakan jumlah masing-masing realisasi dari indikator kinerja kegiatan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II. Khusus pada Triwulan III ini sesuai arahan dari Biro Perencanaan dan Kerja Sama dan juga arahan dari masing-masing Unit Organisasi bahwa pengukuran dilakukan terhadap PK Awal.

Metode Pengukuran Kinerja yang pertama dilakukan dengan membandingkan antara **Realisasi Keuangan per 30 September 2026 terhadap Pagu Anggaran DIPA 2026** dikalikan dengan 100%, sehingga diperoleh capaian kinerja dengan angka satuan persentase realisasi keuangan.

$$\frac{\text{Realisasi Keuangan Per 30 September 2026}}{\text{Pagu Anggaran DIPA 2026}} \times 100\% = \ldots\ldots\ \%$$

Metode Pengukuran Kinerja yang kedua dilakukan dengan mencari selisih (*gap*) antara **persentase realisasi capaian TW-III terhadap persentase target kinerja TW-III pada RENAKSI 2026**, sehingga diperoleh nilai deviasi capaian kinerja.

Pengukuran Kinerja pada Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kegiatan : Capaian Kinerja Keuangan dan/atau Fisik:

%tase Capaian Kinerja TW-III	-	%tase Target Kinerja TW-III (pada Renaksi)	=	.....% Deviasi (positif/negatif)

Berikut ini merupakan interpretasi hasil capaian:

Nilai Deviasi	Klasifikasi	Makna/Pengertian
Positif (+)	*Over-Performed*	Realisasi melampaui target yang ditetapkan dalam RENAKSI
Nol (0)	*On-Track*	Capaian tepat sasaran sesuai dengan perencanaan awal
Negatif (-)	*Under-Performed*	Capaian belum memenuhi target, sehingga diperlukan evaluasi/perbaikan

2.3. Capaian target Triwulan - III

Capaian target menggambarkan capaian kinerja, khususnya pada triwulan III, terhadap target yang tertuang pada PK Awal yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi 2026 yang sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Capaian target meliputi capaian kinerja kegiatan hingga capaian kinerja program pada triwulan III. Dalam pembahasan ini, sesuai arahan dari Biro Perencanaan dan Kerja Sama dan juga arahan dari masing-masing Unit Organisasi bahwa pengukuran dilakukan terhadap PK Awal.

Tabel 2.1.2 Capaian Kinerja Triwulan II BP3KP Sumatera II

Kode	Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	TARGET AWAL						TARGET DIPA REVISI		TRIWULAN-II				
												CAPAIAN			DEVIASI (terhadap Target TW-I)	
				Jumlah Target	Aktivitas	TW-I (%)	TW-II (%)	TW-III (%)	TW-IV (%)	Jumlah Output	Pagu	Realisasi Keuangan	Keu. (%)	Fisik (%)	Keu. (%)	Fisik (%)
IA	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**		**Dokumen, Rekomendasi Kebijakan, Unit, Laporan, Kegiatan**			**15**	**50**	**75**	**100**							
7659	**Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman**		**Dokumen, Rekomendasi Kebijakan, Unit**			**15**	**50**	**75**	**100**							
	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni		**Dokumen, Rekomendasi Kebijakan**	**2**		**15**	**50**	**75**	**100**							
	BMA.001	1) Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	1. Pengelolaan Data dan Informasi Program Satu Juta Rumah di Kawasan Pesisir di Balai Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	15	50	75	100	1	33.786.000	8.360.252	24,74	24,74	-50,26	-50,26
	PBF.001	2) Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1. Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	15	50	75	100	1	80.206.000	44.532.016	55,52	55,52	-19,48	-19,48
	Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan yang terlayani PSU		Dokumen, Unit													

	CBR.001	1)	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Lahan dan Fasilitas PSU	Dokumen	1	Verifikasi Usulan Pembangunan Rusun, Rusus dan PSU Kawasan Permukiman di Wilayah Pesisir serta Fasilitasi Serah Terima Aset	15	50	75	100	1	171.135.000	160.980.331	92,81	92,81	+17,81	+17,81
	RBB.001	2)	Jumlah Pembangunan PSU	Unit	50	1. Perencanaan dan Supervisi Pembangunan PSU Kawasan Permukiman 2. Pembangunan PSU Perumahan 3. Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan PSU	15	50	75	100	70	649.915.000	15.799.000	2,43	2,43	-72,57	-72,57
	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman			**Dokumen, Unit**	**1**		**15**	**50**	**75**	**100**							
	CBR.002	1)	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	1. Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	15	50	75	100	1	80.927.000	72.969.656	90,17	90,17	+15,17	+15,17
	RBB.003	2)	Jumlah Unit Rumah Khusus Kawasan Pesisir	Unit	919	1. Pelaksanaan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman 2. Pengawasan dan Pengendalian Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	15	50	75	100	3441	73.109.774.000	28.735.948.735	39,31	39,31	-35,69	-35,69
	RBB.008	2)	Jumlah Unit Rumah Swadaya melalui Peningkatan Kualitas	Unit	3441	3. Pelaksanaan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman 4. Pengawasan dan Pengendalian Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah	15	50	75	100	3441	73.109.774.000	28.735.948.735	39,31	39,31	-35,69	-35,69

						Swadaya di Kawasan Permukiman										
7660	**Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan**			**Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan, Kegiatan, Unit**			**15**	**50**	**75**	**100**						
	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak huni diperdesaan			**Rekomendasi Kebijakan, Laporan, unit**			**15**	**50**	**75**	**100**						
	ABF.007	1)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1	Penyusunan Perencanaan Teknis Perumahan Pedesaan	15	50	75	100	1	5.270.000	2.590.000	49.15	49.15	-25,85	-25,85
	FAE.004	2)	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Dokumen	1	Fasilitasi Pengalihan Aset Pembangunan Perumahan Perdesaan	15	50	75	100	1	5.766.000	3.700.000	64,17	64,17	-10,83	-10,83
	RBB.006	3)	Jumlah Unit Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan	Unit	200	1. Perencanaan Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan 2. Pembangunan Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan 3. Pengawasan dan Pengendalian Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan	15	50	75	100	200	162.916.224.000	42.032.958,647	25,80	25,80	-49,20	-49,20
	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas Pembangunan perumahan diperdesan			**Rekomendasi Kebijakan**	**1**		**15**	**50**	**75**	**100**						
	ABF.008	1)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1	Penyusunan Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	15	50	75	100	1	60.049.000	53.970.023	89,88	89,88	+14,88	+14,88

	RBB.008	2)	Jumlah Stimulan Peningnkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	Unit	7065	1. Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan 2. Pendampingan Pelaksanaan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	15	50	75	100	5100	151.508.740.000	41.888.228.259	27,65	27,65	-47,35	-47,35
	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam Pembangunan perumahan perdesaan			**Dokumen**	**2**		**15**	**50**	**75**	**100**							
	ABF.009	1)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1	Penyusunan Perencanaan Kegiatan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	15	50	75	100	1	152.852.000	131.649.775	86,13	86,13	+11,13	+11,13
	BMA.001	2)	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesan	Dokumen	1	Pengelolaan Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	15	50	75	100	1	23.577.000	20.856.997	88,46	88,46	+13,46	+13,46
7660	**Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan**			**Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan, Kegiatan, Unit**			**15**	**50**	**75**	**100**							
	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			Rekomendasi Kebijakan,Laporan													
	ABF.001	1)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	Pelaksanaan Konsolidasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	15	50	75	100	1	22.489.000	10.995.000	48,89	48,89	-26,11	-26,11
	FAE 001	2)	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	laporan	2	Pengendalian Program Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan di Balai P3KP SUM II	15	50	75	100	1	40.085.000	30.550.000	76,21	76,21	+1,21	+1,21
						Pengendalian Program Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan di Satker	15	50	75	100	1	24.320.000	0	0	0	-75,00	-75,00
	Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan																
	ABF.002	1)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	Pelaksanaan Konsolidasi Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	15	50	75	100	1	17.413.000	8.030.000	46,11	46,11	-28,89	-28,89

	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan															
	ABF.003	1)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	Pelaksanaan Konsolidasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	15	50	75	100	1	9.413.000	3.700.000	39,31	39,31	-35,69	-35,69
	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan															
	ABF.004	1)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	Pelaksanaan Konsolidasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	15	50	75	100	1	25.489.000	6.640.000	26,05	0	-50,00	-50,00
	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan															
	ABF.005	1)	Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	Pelaksanaan Konsolidasi Penyiapan Bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	15	50	75	100	1	55.489.000	43.465.395	78,33	78,33	+3,33	+3,33
	RBB.008	2)	Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	Unit	2400	1) Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan 2) Pengawasan Pengendalian Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	15	50	75	100	2400	95.889.222	13.306.519.025	13,88	13,88	-61,12	13,88
7662	**Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman**			**Dokumen, Rekomendasi Kebijakan, Unit**			**15**	**50**	**75**	**100**							
	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan public penyelenggaraan perumahan dan kwasan permukiman yang efektif dan akuntabel															
	ABF.004		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Rekomendasi Kebijakan	1	Penyusunan Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	15	50	75	100	1	16.146.000	14.745.000	91,32	91,32	-16,32	-16,32
	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian Risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman															
	ABF.005		Jumlah Rekomendasi kebijakan pengendalian Risiko dan pencegahan korupsi	Rekomendasi Kebijakan	1	Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko	15	50	75	100	1	42.953.000	31.414.000	73,14	73,14	-1,86	-1,86
	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evakuasi dalam penyelenggaraan tata Kelola dan pengendalian Risiko perumahan dan kawasan permukiman															

	FAE.001		Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata Kelola dan pengendalian risiko	Rekomendasi Kebijakan	1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	15	50	75	100	1	9,047.000	4.855.000	53,66	53,66	-21,34	-21,34
IA	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			**Dokumen, Rekomendasi Kebijakan, Unit, Laporan, Kegiatan**												
7665	**Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal**			**Layanan, Unit**												
	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II			Layanan, Unit												
	EBA. 962	1)	Jumlah Layanan Umum	Layanan	2	Layanan Biro Umum	15	50	75	100	1	43.653.000	28.198.287	64,60	64,60	-10,40	-10,40
						Layanan Biro Umum	15	50	75	100	1	20.953.000	20.769.365	99,12	99,12	+24,12	+24,12
	EBA. 994	2)	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	15	50	75	100	1	1.240.745.000	769.992.812	62,06	62,06	-12,94	-12,94
						Operasional dan Pemeliharaan Kantor	15	50	75	100	1	825.757.000	272.982.537	33,06	33,06	-41,94	-41,94
	EBB. 951	3)	Jumlah Layanan Sarana Internal	Unit	2	1. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 2. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	15	50	75	100	1	49.848.000	49.555.000	99,41	99,41	+24,41	+24,41
						3. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	15	50	75	100	1	33.232.000	32.490.000	97,77	97,77	+24,77	+24,77
7674	**Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman**			**Layanan**												
	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman			Layanan												
	EBA.962	1)	Jumlah Layanan Umum	Layanan	2	1. Layanan Umum Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman pada 19 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	15	50	75	100	1	49.419.000	28.084.000	56,83	56,83	-18,17	-18,17
						2. Layanan Umum Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman pada 35 Satker Provinsi	15	50	75	100	1	52.642.000	44.072.712	83,72	83,72	+8,72	+8,72

	EBA.963	2)	Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	Pengelolaan Data dan Informasi serta Publikasi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	15	50	75	100	1	2.902.000	2.590.000	89,25	89,25	+7,95	+7,95
	EBA.Z06	3)	Jumlah Layanan BMN	Layanan	1	Penatausahaan BMN Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman pada 19 Balai pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	15	50	75	100	1	6.174.000	4.440.000	71,91	71,91	-3,09	-3,09
7675	**Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan**																
	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman			Layanan													
	EBA.962	1)	Jumlah Layanan Umum	Layanan	2	Layanan Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	15	50	75	100	1	5.464.000	2.590.000	49,20	49,20	-25,80	-25,80
						Layanan Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	15	50	75	100	1	52.642.000	44.072.712	83.72	83.72	+8,70	+8,70
	EBA.963	2)	Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	Pengelolaan Data dan Informasi serta Publikasi Balai/Satker	15	50	75	100	1	2.808.000	1.480.000	52,71	52,71	-22,29	-22,29
7661	**Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan**																
	EBA.962		Jumlah Layanan Umum	Layanan	2	1. Layanan Umum Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan di Balai P3KP	15	50	75	100	1	9.357.000	2.809.000	30,02	30,02	-44,98	-44,98
						2. Layanan Umum Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan di Satuan Kerja Penyediaan Perumahan	15	50	75	100	1	14.800.000	0	0	0	-75,00	-75,00
	EBA.963		Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	Pengelolaan Data dan Informasi serta Publikasi Perumahan Perkotaan di Balai P3KP	15	50	75	100	1	5.134.000	3.470.000	67,59	67,59	-7,41	-7,41
	EBA.Z06		Layanan BMN	Layanan	1	Rencana Kebutuhan dan Pengelolaan BMN Perumahan Perkotaan Balai P3KP	15	50	75	100	1	5.874.000	3.420.000	58,22	58,22	-16,78	-16,78

Berdasarkan Tabel 2.1.2 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dukungan Manajemen pada BP3KP Sumatera II memiliki realisasi keuangan dan fisik masing-masing 57,66 %, dan berdasarkan target yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Kinerja, Triwulan III ditetapkan target sebesar 75.00%, sehingga terdapat deviasi sebesar 17,34% (deviasi negatif) yang berarti tidak mencapai target yang ditetapkan.

2.4. Permasalahan dan Faktor Keberhasilan

A. Permasalahan

Berdasarkan hasil pemantauan realisasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III, masih terdapat beberapa kegiatan yang memiliki tingkat realisasi keuangan dan fisik di bawah target yang telah ditetapkan. Dari data tabel, rata-rata realisasi keuangan dan fisik tercatat sebesar 57,66%, sehingga masih terdapat selisih antara target dan capaian pada beberapa kegiatan.

Beberapa kegiatan menunjukkan realisasi yang relatif rendah, antara lain kegiatan Jumlah Pembangunan PSU dengan realisasi sebesar 2,43%, Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan sebesar 27,65%, Jumlah Unit Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan sebesar 25,80%, serta Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan sebesar 13,88%. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan yang belum menunjukkan realisasi, yaitu kegiatan Pengendalian Program Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan di Satker dan salah satu kegiatan Layanan Umum Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan di Satuan Kerja Penyediaan Perumahan, yang tercatat memiliki realisasi sebesar 0%.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya deviasi antara target dan realisasi pelaksanaan kegiatan. Beberapa kegiatan dengan capaian rendah masih memerlukan percepatan pelaksanaan dan pengendalian agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Berdasarkan tabel, permasalahan terutama terlihat pada kegiatan yang memiliki target output dalam jumlah besar atau kegiatan yang pelaksanaannya masih berada pada tahap proses, sehingga realisasi keuangan dan fisiknya belum mencapai target triwulanan.

B. Faktor Keberhasilan

Di samping adanya kegiatan dengan capaian rendah, terdapat pula sejumlah kegiatan yang telah menunjukkan realisasi yang cukup tinggi. Beberapa di antaranya adalah Layanan Sarana Internal dengan realisasi sebesar 99,41%, Jumlah Layanan Sarana Internal sebesar 97,77%, Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Lahan dan Fasilitas PSU sebesar 92,81%, Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas sebesar 91,32%, serta Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman sebesar 90,17%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pada beberapa kegiatan, pelaksanaan program dan dukungan manajemen telah berjalan sesuai dengan rencana sehingga mampu menghasilkan realisasi yang tinggi. Faktor keberhasilan yang dapat dilihat dari data antara lain adanya perencanaan kegiatan yang telah berjalan, pelaksanaan kegiatan sesuai tahapan, serta dukungan pengelolaan dan pengendalian kegiatan. Tingginya realisasi pada sejumlah kegiatan juga menunjukkan adanya kemampuan unit kerja dalam menyelesaikan kegiatan yang bersifat administratif, pelayanan, dan penyusunan dokumen sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, pencapaian realisasi yang tinggi pada beberapa kegiatan dapat menjadi salah satu gambaran pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan efektif, sedangkan kegiatan dengan realisasi rendah perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan periode berikutnya melalui pemantauan, koordinasi, dan percepatan pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

BAB III
PENUTUP

3.1. Rencana Tindak Lanjut.

Rencana tindak lanjut atas permasalahan yang dihadapi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut.

No.	Kegiatan	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
1	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Realisasi keuangan dan fisik sebesar 24,74%, masih terdapat deviasi sebesar -50,26% terhadap target Triwulan III.	Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian dokumen serta meningkatkan pemantauan terhadap progres kegiatan agar target dapat tercapai.
2	Jumlah Pembangunan PSU	Realisasi keuangan dan fisik masih rendah, yaitu 2,43%, dengan deviasi -72,57%.	Melakukan percepatan proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan PSU dan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.
3	Jumlah Unit Rumah Khusus Kawasan Pesisir	Realisasi sebesar 39,31% dengan deviasi -35,69% dari target.	Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan pengawasan terhadap proses peningkatan kualitas rumah swadaya serta memastikan tahapan kegiatan berjalan sesuai rencana.
4	Jumlah Unit Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan	Realisasi keuangan dan fisik sebesar 25,80%, dengan deviasi -49,20%.	Meningkatkan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pembangunan serta mempercepat proses kegiatan yang masih berjalan.
5	Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	Realisasi sebesar 27,65%, masih terdapat deviasi sebesar -47,35%.	Mempercepat pelaksanaan pemberian stimulan, pendampingan, serta pengawasan dan

No.	Kegiatan	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
			pengendalian agar target kegiatan dapat tercapai.
6	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Realisasi sebesar 48,89%, dengan deviasi -26,11% terhadap target.	Meningkatkan percepatan penyusunan rekomendasi dan koordinasi dalam pelaksanaan konsolidasi kebijakan, strategi, dan program prioritas.
7	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Realisasi sebesar 46,11%, dengan deviasi -28,89%.	Melakukan percepatan pelaksanaan konsolidasi kebijakan serta meningkatkan koordinasi dan pemantauan terhadap progres kegiatan.
8	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Realisasi sebesar 39,31%, dengan deviasi -35,69%.	Mempercepat proses konsolidasi kebijakan dan meningkatkan koordinasi agar target kegiatan dapat diselesaikan sesuai rencana
9	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Realisasi keuangan sebesar 26,05% dan realisasi fisik 0%, dengan deviasi fisik -50,00%	Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan memastikan tahapan kegiatan segera dilaksanakan serta dipantau secara berkala.
10	Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	Realisasi sebesar 13,88%, menunjukkan deviasi yang cukup besar pada pelaksanaan kegiata	Mempercepat pelaksanaan bantuan stimulan serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan.
11	Pengendalian Program Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan di Satker	Belum terdapat realisasi keuangan dan fisik (0%), dengan deviasi -75,00%.	Melakukan evaluasi terhadap kendala pelaksanaan, mempercepat proses kegiatan, dan meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja terkait.

No.	Kegiatan	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
12	Layanan Umum Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan di Satuan Kerja Penyediaan Perumahan	- Belum terdapat realisasi keuangan dan fisik (0%), dengan deviasi -75,00%.	Melakukan identifikasi kendala dan percepatan pelaksanaan layanan serta meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait agar kegiatan dapat segera direalisasikan.

Tabel 3.2 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya.

Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Permasalahan	Upaya Yang Telah Dilaksanakan	Tindak Lanjut
1	Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Belum optimalnya penyerapan anggaran pada akun Belanja Bahan 521211 sehingga memicu deviasi target output	Telah dilakukan koordinasi internal secara berkala untuk mengevaluasi dan mendorong percepatan penyerapan anggaran Belanja Bahan.	Selesai
2	Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Fasilitasi PSU	Alokasi penyerapan anggaran belum optimal pada Belanja Bahan 521211, Belanja Sewa 522141, dan Belanja Profesi 522151.	Telah dilakukan koordinasi dalam rangka mempercepat realisasi keuangan pasca-terbitnya revisi pagu DIPA-04	Selesai
3	Dukungan Teknis Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan	Penyerapan operasional keuangan pada Belanja Bahan 521211, Belanja Sewa 522141, dan Belanja Profesi 522151 belum berjalan optimal.	Telah dilakukan evaluasi capaian secara berkala dan koordinasi untuk mempercepat penyelesaian administrasi.	Selesai

No.	Kegiatan	Permasalahan	Upaya Yang Telah Dilaksanakan	Tindak Lanjut
4	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan KP	Belum optimalnya penyerapan Belanja Bahan 521211 dan belum adanya kesepakatan tertulis dengan USU, UMSU, dan Universitas Nomensen.	Telah dilakukan koordinasi internal untuk optimalisasi anggaran bahan serta sosialisasi Klinik PKP dalam rangka menjaring minat mitra daerah.	Selesai
5	Layanan Data, Informasi, dan Keterbukaan Informasi Publik	Terjadi pemotongan anggaran setelah perjalanan dinas sehingga biaya dinas tidak dapat dibayarkan karena nominal melebihi pagu revisi akhir.	Telah dilakukan penyampaian/koordinasi terkait kebutuhan anggaran operasional akibat adanya penyesuaian pagu.	Selesai
6	Layanan BMN (Aset Manajemen Balai)	Belum terselesaikannya administrasi Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk memastikan status aset perbantuan di lingkungan balai.	Telah dilakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan unit kerja/instansi terkait untuk penyelesaian dokumen BAST.	Selesai
7	Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Proses verifikasi membutuhkan waktu lama karena data BNBA awal tidak mutakhir sehingga waktu kerja TFL banyak digunakan untuk mencari CPB pengganti.	Telah dilakukan pemetaan dan perubahan lokasi usulan penanganan ke desa/kecamatan yang aman dari potensi bantuan ganda.	Selesai
8	Pembangunan PSU Perumahan Tapak SMK Residence 2 Deli Serdang	Realisasi fisik belum berjalan karena dokumen kontrak masih dalam proses	Telah dilakukan pengawalan terhadap proses reviu dokumen pengadaan dan persiapan penarikan	Selesai

No.	Kegiatan	Permasalahan	Upaya Yang Telah Dilaksanakan	Tindak Lanjut
		reviu administratif.	pembayaran termin Konsultan Perencana.	
9	Rumah Khusus	Lahan untuk relokasi di Kabupaten Humbang Hasundutan belum clean and clear karena masih milik warga dan belum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten.	Telah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terkait kesiapan dan status lahan.	Selesai